

Pergerakan LSM Nol Sampah dalam Mengawal Politik Hijau Kota Surabaya Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo

Studi Kasus Pendampingan Petani Lokal Pohon mangrove di Bosem Wonorejo Surabaya

Valihuddin Rizal*

ABSTRAK

Kawasan hutan mangrove yang saat ini sedang hangat diperbincangkan yakni di daerah Wonorejo Rungkut Surabaya, mengingat peran kawasan mangrove di Wonorejo sangat penting sebagai penyangga Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) dari ancaman abrasi laut. Tak heran dengan pentingnya kawasan ini PEMKOT Surabaya pun tak luput dalam memformulasikan kebijakan dan melahirkan tempat EKOWISATA yang saat ini dinamai Ekowisata Mangrove Wonorejo.

Namun masalah mulai muncul ketika Kawasan konservasi mangrove Wonorejo yang dijadikan Ekowisata Mangrove, ternyata tidak sesuai harapan. Mangrove di kawasan itu justru mengalami kerusakan yang parah. Padahal niat Pemkot Surabaya, menjadikan kawasan itu sebagai kawasan penyangga pantai timur Surabaya (Pamurbaya) dari abrasi pantai

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan pada upaya LSM Nol Sampah yang selama ini memang aktif dalam pengawalan kebijakan lingkungan kota Surabaya. Dalam konteks ini, LSM Nol sampah melakukan pendampingan kepada petani lokal mangrove di area ekowisata mangrove Bosem Wonorejo dengan tujuan petani lokal memiliki pengetahuan yang cukup agar nantinya bias bersama-sama LSM Nol Sampah mengawasi pengelolaan ekowisata ini.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah ketua LSM Nol Sampah beserta anggotanya, Petani lokal sekitar area ekowisata, serta sebagai data pembanding juga dilakukan wawancara kepada pengelola ekowisata dalam hal ini FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat) Nirwana eksekutif.

Kata Kunci : Gerakan, Politik Hijau, LSM Nol Sampah

ABSTRACT

Mangrove forest area that is currently being hotly discussed in the Surabaya area Rungkut Wonorejo, given the role of mangrove in the region is very important as a buffer Wonorejo East Coast Surabaya (Pamurbaya) from the threat of marine abrasion. No wonder the importance of this region did not escape the Surabaya City Government in formulating policies and birth place is now named Mangrove Ecotourism Wonorejo.

But problems began to emerge when the mangrove conservation area Wonorejo Mangrove Ecotourism is made, it was not as expected. Mangroves in the region experienced a severe damage. Though the intention of Surabaya City Government, making the region as a buffer zone east coast of Surabaya (Pamurbaya) from coastal erosion

This research is a qualitative research that emphasizes the NGO Nol Sampah efforts that have been active in the guard's environmental policies of Surabaya. In this context, NGOs perform assistance to local farmers in the area of mangrove mangrove ecotourism destination Bosem Wonorejo with local farmers to have sufficient knowledge to be together in overseeing the management of ecotourism.

In this research, the subject of study was the chairman of the Nol Sampah NGOs and their members, local Farmers around the area of ecotourism, as well as comparable data was also conducted interviews to the managers of ecotourism FKPM (Police Community Partnership Forum) Nirvana executive.

Keyword: Movement, Green Politics, NGOs Nol Sampah

* Mahasiswa S 1 Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan suatu daerah dipengaruhi oleh proses pembangunan yang memunculkan perubahan struktur perkotaan. Implikasi perubahan struktur perkotaan akan melahirkan masalah sosial pada masyarakat yang tinggal di kota tersebut. Dalam kenyataannya, kompleksitas permasalahan tersebut menyebabkan pemerintah kota kesulitan dalam menangani masyarakatnya. Indikasi kesulitan tersebut dapat dilihat dengan keterlibatan masyarakat dalam memecahkan masalah tidak menunjukkan adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Diantaranya misalkan formulasi kebijakan, mobilisasi sumber daya serta implementasi program dengan maksud memperbaiki keadaan.

Sebagai sebuah kota besar, Surabaya masih belum bisa lepas dari persoalan tata kota. Hutan mangrove adalah salah satu permasalahan global yang mulai juga terasa di Surabaya. Di Surabaya, ekosistem hutan mangrove mengalami ancaman berupa penebangan, fragmentasi dan konversi menjadi bentuk pemanfaatan lain. Penebangan/ penggundulan hutan mangrove di wilayah Kota Surabaya sudah terjadi sejak lama tepatnya di daerah Kecamatan Sukolilo dan Gununganyar, yang mana kegiatan ini dapat mengganggu sumberdaya alam yang lain. Jika penggundulan hutan mangrove terjadi secara terus menerus, maka akan mengancam spesies flora dan fauna dan merusak sumber kehidupan masyarakat. Umumnya kerusakan/ kepunahan keanekaragaman hayati dapat menyebabkan 6 (enam) penyebab utama yaitu :

- a. Laju peningkatan populasi manusia dan konsumsi SDA yang tidak berkelanjutan,
- b. Penyempitan spektrum produk yang diperdagangkan dalam bidang pertanian, kehutanan dan perikanan,
- c. Sistem dan kebijaksanaan ekonomi yang gagal dalam memberi penghargaan pada lingkungan dan sumberdayanya,
- d. Ketidakadilan dalam kepemilikan, pengelolaan dan penyaluran keuntungan dari e. penggunaan dan pelestarian sumberdaya hayati,
- f. Kurangnya pengetahuan dan penerapan,

g. Sistem hukum dan kelembagaan yang mendorong eksploitasi.

Dengan misi pada awalnya untuk mengembalikan hutan mangrove akibat penebangan liar. Selama perjalanan, misi ini berkembang menjadi ekowisata. Konsep ekowisata hutan mangrove wonorejo, disamping menjaga dan mengembalikan hutan mangrove, juga ada pendidikan, pelatihan dan pengelolaan hutan mangrove yang berkesinambungan. Lembaga

Ekowisata Hutan Mangrove melakukan usaha-usaha konservasi terhadap hutan mangrove, bekerja sama dengan kepolisian dalam hal mencegah penebangan liar dan pengerusakan di kawasan konservasi serta membangun fasilitas-fasilitas untuk kegiatan wisata. Selain itu Lembaga Ekowisata juga berfungsi sebagai sumber informasi mengenai ekosistem hutan mangrove. Sesuai tujuannya yakni pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan. MICW menawarkan suatu bentuk kegiatan wisata yang tetap memperhatikan kelestarian hutan mangrove berserta flora dan fauna yang terdapat di hutan mangrove wonorejo, atau yang lazim disebut EKOWISATA yaitu suatu bentuk kegiatan wisata yang Ramah Lingkungan dan Bertanggung Jawab.

Namun masalah mulai muncul ketika Kawasan konservasi mangrove Wonorejo yang dijadikan Ekowisata Mangrove, ternyata tidak sesuai harapan. Mangrove di kawasan itu justru mengalami kerusakan yang parah. Padahal niat Pemkot Surabaya, menjadikan kawasan itu sebagai kawasan penyangga pantai timur Surabaya (Pamurbaya) dari abrasi pantai. Kerusakan mangrove di Wonorejo tidak hanya berasal dari kesalahan pihak penanam atau pengelola dan masyarakat sendiri tapi juga kesalahan dalam pemilihan bibit mangrove yang ditanam. Bukan hanya dua permasalahan teknis tersebut, dalam perjalananya pengelolaan EKOWISATA yang harusnya tetap memperhatikan fungsi awalnya sebagai lahan dan sarana konservasi dan edukasi yang berkaitan dengan tanaman mangrove mulai terjadi berbagai penyelewengan dan kesalahan prosedur.

Di berbagai kesempatan, Wawan Some selaku koordinator LSM Nol Sampah berbicara diberbagai media, seminar-seminar, dan tak jarang mengajak aktif berbagai

kalangan dan LSM lain untuk berkomunikasi dengan pihak bersangkutan tak terkecuali PEMKOT Surabaya. Dalam pandangannya bersama sedikitnya tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan di Kota Surabaya menuding pemkot Surabaya merusak ekosistem alam di kawasan pantai timur Surabaya (Pamurbaya).

Termasuk rusaknya ekowisata hutan mangrove. Tudingan ini dikemukakan Komunitas Nol Sampah, Ecoton, Rumah Mangrove Surabaya, dan kelompok pengamat burung Peksia Unair.

Koordinator Komunitas Nol Sampah Surabaya Wawan Some mengatakan, ekowisata yang selama ini dikelola Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Kelurahan Wonorejo adalah menyalahi aturan. Kegiatan ekowisata di Pamurbaya, utamanya di Wonorejo perlu mendapat perhatian serius lantaran kegiatan tersebut justru mengganggu ekosistem hutan mangrove di kawasan Pamurbaya. Selain itu, kegiatan penanaman perlu dikontrol karena

penanaman jenis mangrove yang salah justru bisa merusak kestabilan ekosistem di kawasan tersebut.

Pantauan aktivis lingkungan setahun terakhir menunjukkan, penanaman selama ini justru dilakukan di lokasi yang sebenarnya sudah ada jenis mangrove yang tumbuh secara alami. Wawan Some menambahkan, suara bising dari mesin perahu yang dipakai rombongan wisatawan atau peserta tanam mangrove massal menuju muara ditengarai mengganggu keberadaan burung di Pamurbaya. Perahu ekowisata yang relatif besar menghasilkan gelombang yang besar dan merusak tepi sungai. Belum lagi suara motor yang ditempel pada perahu.

Petani tambak maupun nelayan sekitar juga terkena imbas. Penghasilan mereka menurun karena turunnya jumlah tangkapan. Penunggu tambak berkurang, karena udang yang bisanya masuk perangkap (prayang) bisa mencapai 10 kg saat ini maksimal hanya 2 kg. Tingginya aktifitas manusia di Pamurbaya, imbuhnya, saat ini diduga berdampak pada satwa liar, utamanya burung. Sehingga bukan tidak mungkin kasus daun *Avicennia marina* yang dimakan lalat beberapa waktu lalu disebabkan karena populasi burung pemakan serangga di Pamurbaya berkurang. Disamping

itu, keberadaan gazebo yang saat ini ada tiga bangunan di depan hutan mangrove yakni di sisi timur perlu dikaji, karena secara alami hutan mangrove akan terus tumbuh ke arah laut (timur). (Surabaya pagi.com, 6 Mei 2011)

Secara teknis pengelolaan terdapat kesalahan pengelolaan, dimana banyak mangrove jenis *Sonneratia Alba*, *Avicennia Alba* dan *Rhizophora Apiculata* yang ditebang. Padahal, ketiga jenis mangrove ini memiliki akar yang kuat dan tahan terhadap terjangan air laut. Tidak hanya itu saja, lanjut dia, penebangan tersebut membawa efek domino karena mangrove yang terletak di bagian dalam dan tidak memiliki akar yang kuat, sehingga akhirnya rusak akibat diterjang ombak.

Mangrove yang ada di Wonorejo sekarang ini jenis *Avicennia Marina* atau biasa disebut api-api. Mangrove inilah yang banyak roboh karena akarnya tidak terlalu kuat. Selain itu, mangrove yang banyak ditanam instansi pemerintah maupun perusahaan dalam rangka program "Corporate Social Responsibility" (CSR) ternyata juga bukan jenis yang memiliki akar kuat. Mangrove yang banyak ditanam sekarang adalah jenis bakau dengan nama latin *Rhizophora Mucronata* yang sebenarnya tidak tahan air bersalinitas tinggi.

Disisi lain, dalam pembangunan ekowisata mangrove wonorejo terdapat satu permasalahan yang tidak banyak diketahui oleh media dan kalangan luas, bahwa tidak semua petani lokal pohon bakau yang selama ini berkecimpung dalam pelestarian tanaman bakau setempat diikutkan dalam perumusan kebijakan serta desain ekowisata ini, justru

PEMKOT Surabaya lebih cenderung memilih petani-petani tertentu yang setuju dengan platform pembangunan ekowisata ini untuk menjadi mitra. Sedangkan petani-petani lokal lain yang dianggap "membangkang" tidak dilibatkan lebih lanjut.

Pada kenyataannya di kalangan bawah, khususnya petani mangrove yang paham akan kelestarian lingkungan, perlakuan tersebut menjadi salah satu bibit permasalahan yang sensitive ketika pada akhirnya terdapat berbagai kesalahan dan penyalahgunaan fungsi ekowisata mangrove wonorejo ini. Bahkan ada kecurigaan dari petani lokal yang tidak dilibatkan tadi, serta LSM nol sampah bahwa pembangunan ekowisata mangrove wonorejo

hanya dititik beratkan pada nilai bisnis semata, dan alasan konservasi justru hanya merupakan tading alih-alihnya.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepentingan apa yang diartikulasikan oleh LSM Nol sampah kepada petani lokal non mitra PEMKOT Surabaya di sekitar Ekowisata Mangrove Wonorejo Rungkut Surabaya ?
2. Bagaimana upaya LSM Nol Sampah mendampingi petani Lokal non mitra PEMKOT Surabaya dalam mengkritisi pengelolaan Ekowisata Mangrove Wonorejo Rungkut Surabaya?
3. Bagaimana proses politik yang terjadi dalam pengawalan pengelolaan ekowisata Wonorejo Rungkut Surabaya?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kepentingan yang di artikulasikan oleh LSM Nol sampah kepada petani lokal non mitra PEMKOT Surabaya di sekitar Ekowisata Mangrove Wonorejo Rungkut Surabaya
2. upaya LSM Nol dalam pendampingan petani Lokal non mitra PEMKOT Surabaya dalam mengkritisi pengelolaan Ekowisata Mangrove Wonorejo Rungkut Surabaya.
3. proses politik yang terjadi dalam pengawalan pengelolaan Ekowisata Mangrove Wonorejo Rungkut Surabaya.

Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dalam manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi studi politik hijau para akademisi baik itu mahasiswa, aktivis, atau peneliti lain yang memiliki ketertarikan pada masalah Green politik (Politik hijau).
2. Penelitian ini diharapkan juga dapat dipakai sebagai pedoman pemerintah kota untuk mengelola Ekowisata Mangrove Wonorejo Rungkut Surabaya dengan benar atau ssesuai dengan rambu-rambu politik hijau, sehingga diharapkan kelestarian alam di area Ekowisata Mangrove Wonorejo Rungkut Surabaya lebih terjaga.
3. Manfaat praktis penelitian ini adalah untuk

menciptakan kesadaran bagi Pemerintah kota Surabaya, Petani bakau lokal, serta seluruh warga masyarakat akan pentingnya pengelolaan Ekowisata Mangrove Wonorejo Rungkut Surabaya yang tepat dan sesuai dengan rambu-rambu politik hijau yang ada.

Kajian Teoritik

1. Green Political Theory (teori politik hijau)

Teori Politik Hijau (Green political theory) adalah khusus diambil dari fakta bahwa manusia merupakan bagian dari alam yang memiliki implikasi bagi teori politik. Dengan demikian manusia tidak hanya dilihat sebagai individu yang rasional (seperti dalam pandangan liberalism) atau sebagai makhluk sosial (seperti pandangan sosialisisme) akan tetapi sebagai natural beings, dan lebih jauh sebagai political animals.

Sedangkan perlu untuk membedakan antara green politics dan environmentalism. Environmentalis menerima kerangka kerja yang ada dalam politik, sosial, ekonomi dan struktur normative dalam dunia politik dan mencoba memperbaiki masalah lingkungan dengan struktur yang ada tersebut. Sementara Politik Hijau menganggap bahwa struktur tersebut sebagai dasar utama bagi munculnya krisis lingkungan. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa struktur tersebut butuh perubahan dan perhatian yang lebih utama.

Dalam pembahasan lain di buku Theories of International Relations karya Andrew Linklater dan Scott Burchill (1996), di jabarkan bahwa dunia sedang mengalami masalah yang sangat krusial, terlepas dari isu-isu yang selalu dibahas dalam ilmu Hubungan Internasional, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan, dan sebagainya. Masalah ini mengikis eksistensi bumi dalam aspek fisiknya secara perlahan. Masalah ini pula lah yang seringkali terlupakan dan sengaja diacuhkan padahal dampaknya telah menjadi *global issue*. Masalah ini juga belum dapat ditemui titik terangnya karena solusi-solusi yang ada masih menjadi perdebatan lintas batas negara.

Politik Hijau memiliki asumsi dasar yaitu penolakan terhadap antroposentrisme. Antroposentrisme sendiri memiliki arti "ajaran yg menyatakan bahwa pusat alam semesta adalah manusia". Pemikiran Politik Hijau yang berbasis ekosentrisme ini berusaha

mengaitkan keberadaan individu dengan ekologi dan berusaha memberi pemetaan yang tegas antara kepentingan manusia dan bukan-manusia. Kehadiran Politik Hijau sebagai teori kritik dalam Hubungan Internasional ini memiliki pandangan yang tegas terhadap tiga mazhab terkemuka dalam HI. Pertama, Politik Hijau mengkritisi kaum realis yang memiliki asumsi dasar *state-centric*.

Preskripsi lain mengenai Politik Hijau coba diutarakan oleh Gerald F. Gaus dan Chandran Kukathas dalam buku mereka *Handbook Teori Politik* (2012). Dalam buku tersebut masalah lingkungan yang melanda dunia secara global dapat diatasi dengan cara memperluas komunitas politik ke arah yang berbeda, berbeda disini dimaksudkan untuk memisahkan dengan teks ideology ideology politik lama yang non lingkungan. Kita diajak untuk memikirkan sejenak tentang lingkungan sebagai suatu keanekaragaman sumberdaya dari segala jenis. Bukan hanya jenis sumber daya yang dibutuhkan untuk bertahan hidup secara fisiologis, tetapi juga sumber daya yang dibutuhkan untuk memahami segala jenis rencana kehidupan. Artinya inilah "lingkungan" yang dipahami sebagai 'perkataan dan perbuatan' yang membentuk dan melaksanakan berbagai rencana kehidupan. Bila diutarakan dengan cara lain, lingkungan merupakan ragam opsi tentang konsepsi dan perencanaan kehidupan.

2. Teori Gerakan Sosial

Gerakan sosial merupakan gerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara kolektif, kontinu dan/atau sistematis. Gerakan ini mendukung atau menentang keberlakuan tata kehidupan tertentu karena mereka memiliki kepentingan di dalamnya, baik secara individu, kelompok, komunitas, atau level yang lebih luas lagi.

Dalam pengertian lain Gerakan sosial (*social movement*) adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbetuk organisasi, berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan sebuah perubahan sosial. (Wikipedia).

Lingkup

- o Gerakan reformasi - gerakan yang didedikasikan untuk mengubah beberapa norma, biasanya hukum. Contoh gerakan semacam ini akan mencakup seperti, serikat buruh dengan tujuan untuk meningkatkan hak-hak pekerja, gerakan hijau yang menganjurkan serangkaian hukum ekologi, atau sebuah gerakan pengenalan baik yang mendukung atau yang menolak adanya, hukuman mati atau hak untuk dapat melakukan aborsi. Dalam beberapa gerakan reformasi memungkinkan adanya penganjuran perubahan terhadap norma-norma moral misalkan, mengutuk pornografi atau proliferasi dari beberapa agama. Sifat gerakan semacam itu tidak hanya terkait dengan masalah tetapi juga dengan metode yang dipergunakan, dari kemungkinan ada penggunaan metode yang sikap reformis non-radikal yang akan digunakan untuk pencapaian akhir tujuan, seperti dalam kasus aborsi agar dapat tercipta adanya pembuatan hukum perundangan-undangan.
- o Gerakan radikal - gerakan yang didedikasikan untuk adanya perubahan segera terhadap sistem nilai dengan melakukan perubahan-perubahan secara substansi dan mendasar, tidak seperti gerakan reformasi, Contohnya termasuk Gerakan Hak Sipil Amerika yang penuh menuntut hak-hak sipil dan persamaan di bawah hukum untuk semua orang Amerika (gerakan ini luas dan mencakup hampir seluruh unsur-unsur radikal dan reformis), terlepas dari ras, yang di Polandia dikenal dengan nama Solidaritas
- /(Solidarno[) gerakan yang menuntut transformasi dari sebuah tata nilai politik Stalinisme menuju kepada tata nilai sistem politik sistem ekonomi atau ke dalam tata nilai sistem politik demokrasi atau di Afrika Selatan disebut gerakan penhuni gubuk Abahlali baseMjondolo yang menuntut dimasukkannya para penghuni gubuk secara penuh ke dalam penghunian kehidupan kota.

Jenis perubahan

- o Gerakan Inovasi - gerakan yang ingin mengaktifkan norma-norma tertentu, nilai-nilai, dan lain-lain gerakan advokasi yang tak umum kesengajaan untuk efek dan

menjamin keamanan teknologi yang tak umum adalah contoh dari gerakan inovasi.

- o Gerakan Konservatif - gerakan yang ingin menjaga norma-norma yang ada, nilai, dan sebagainya. Sebagai contoh, anti-abad ke-19, gerakan modern menentang penyebaran makanan transgenik dapat dilihat sebagai gerakan konservatif dalam bahwa mereka bertujuan untuk melawan perubahan teknologi secara spesifik, namun mereka dengan cara yang progresif gerakan yang hanya bersikap anti-perubahan (misalnya menjadi anti-imigrasi) sedang untuk hasil tujuan kepentingan tidak pernah didapat hanya merupakan bersifat bertahan.

Pengertian tentang gerakan social secara teoritis tadi kemudian dapat dikaitkan dengan Teori mobilisasi sumber daya, dimana dapat menguasai lapangan ketika ia mengalahkan teori psikologi sosial dan teori perpecahan, teori gerakan sosial baru dan teori mobilisasi sumber daya atau pendekatan eropa dan Amerika satu sama lain saling bertanding.

Teori proses-proses politik mengambil alih lapangan dan psikologi sosial kembli ke pusat perhatian ketika pendekatan kontruksi sosial mulai mendapatkan perhatian. Theory Bashing menjadi praktik umum di dalam literatur gerakan dan mulai mempertanyakan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Pada kenyataannya gerakan sosial bisa di picu oleh ketidak puasan yang timbul belum lama berselang, oleh sumber daya yang tersedia, oleh peluang yang berubah, dan oleh rekontruksi sosial tentang makna.

3. Teori Kelompok Kepentingan

Menurut Almond terdapat empat saluran penting dalam mengartikulasikan kelompok kepentingan sehingga mampu untuk mengajukan kepentingannya (Ramlan Surbakti, 1984), yaitu:

1. Melalui demonstrasi, huru-hara yang bersifat fisik dan kekerasan.
2. Melalui hubungan pribadi seperti sesama alumni, kawan lama, satu daerah atau bahkan kerabat.
3. Melalui para elit yang bersimpati pada mereka.
4. Melalui saluran formal dan institusional seperti melalui lembaga eksekutif dan legislatif maupun media komunikasi.

Lebih lanjut Almond menjelaskan dalam bentuk klasifikasi gaya dan sifat pengajuan kepentingan menjadi empat (Ramlan Surbakti, 1984), yaitu:

1. Bersifat Manifest, yaitu sifat yang terbuka dan terus terang sehingga mudah diketahui maksudnya. Atau Latent, yaitu bersifat terpendam, tertutup dan berwujud perilaku atau tindakan yang dapat ditafsirkan seperti mogok, walk out.
2. Bersifat spesifik, yaitu jelas atau terperinci tentang apa yang diharapkan. Atau Kabur, yang secara umum samar tentang tuntutan yang dikemukakan misalnya tuntutan tentang perubahan masyarakat, tidak jelas perubahan yang bagaimana yang dimaksudkan.
3. Bersifat umum, menyangkut kepentingan umum/ kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat. Atau khusus, merupakan cerminan golongan tertentu dalam masyarakat.
4. Bersifat Afeksi, berwujud harapan, penyesalan, penghargaan, kemarahan, ketakutan dan apatisme. Atau instrumental, yaitu bersifat tawar-menawar di mana masing-masing pihak menanggung konsekuensi yang menguntungkan dan merugikan. Sedangkan menurut V.O. Key Jr, terdapat pilihan lain sebagai teknik pengajuan kepentingan yaitu antara lain melalui manipulasi opini publik, mempengaruhi dengan cara membujuk pembuat kebijakan, hubungan dengan agen administrator pemerintah untuk mencapai saluran pembuatan keputusan lobby antar kelompok sealiran serta hubungan dengan badan atau lembaga yang kuat dan besar seperti keadilan.

Dalam suatu sistem politik, adanya suatu kelompok kepentingan seringkali merupakan suatu kebutuhan yang tak bisa dihindari bagi kelompok-kelompok yang ada di dalam sebuah komunitas masyarakat, hal ini tidak lain karena berbagai kebijakan atau keputusan politik yang ada seringkali tidak sesuai dengan aspirasi kelompok yang ada, sehingga sebuah kelompok kepentingan bertugas untuk memperjuangkan aspirasi anggotanya agar tercipta sebuah keputusan yang dapat menampung aspirasi yang ada dalam masyarakat.

Kelompok kepentingan adalah sejumlah

orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan atau tujuan, yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan. Sebagai kelompok yang terorganisasi mereka tidak hanya memiliki sistem keanggotaan yang jelas, tetapi juga memiliki pola kepemimpinan, sumber keuangan untuk membiayai kegiatan, selain itu yang paling utama adalah mereka memiliki pola komunikasi baik ke dalam maupun ke luar organisasi.

Di sini kelompok kepentingan berbeda dengan dengan partai politik. Kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa pada waktu yang sama, dan tidak berkehendak memperoleh jabatan publik. Sebaliknya partai politik benar-benar bertujuan untuk menguasai jabatan publik, yaitu jabatan politik maupun pemerintahan.

Kelompok kepentingan juga beda dengan kelompok penekan. Kelompok kepentingan pada dasarnya bertujuan mengartikulasikan kepentingan anggota-anggota kelompoknya agar dapat tercipta sebuah keputusan pemerintah yang dapat menampung artikulasi kepentingan anggota-anggota kelompoknya. Kelompok penekan secara sengaja mengelempokkan diri untuk satu tujuan khusus setelah itu bubar dan secara khusus pula berusaha mempengaruhi

atau menekan para pejabat pemerintah untuk menyetujui tuntutan mereka (Ramlan Surbakti, 1992).

Jenis-jenis kelompok kepentingan menurut Gabriel A. Almond:

1. Kelompok Anomik

Kelompok-kelompok anomik ini terbentuk di antara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan dan hanya seketika, dan karena tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur, kelompok ini sering bertumpang tindih (overlap) dengan bentuk-bentuk partisipasi politik non-konvensional, seperti demonstrasi, kerusuhan, tindakan kekerasan politik dan sebagainya. Sehingga apa yang dianggap sebagai perilaku anomik mungkin saja tidak lebih dari tindakan kelompok-kelompok terorganisir (bukan kelompok anomik). Yang menggunakan cara-cara non-konvensional atau kekerasan seperti "gerilya kota". Apabila kelompok terorganisir tidak ada atau tidak terwakili secara memadai

kepentingannya dalam sistem politiknya, kekecewaan yang menumpuk bisa diletupkan akibat suatu insiden atau dengan munculnya seorang pemimpin dan dengan tiba-tiba bisa meledak tanpa terkendali.

2. Kelompok Non-Asosional

Kelompok kepentingan non-assosional merupakan kelompok kepentingan yang jarang terorganisasi rapi dan kegiatannya bersifat kadangkala. Kelompok ini pada umumnya berasal dari kelompok-kelompok keluarga dan keturunan etnik, regional, status, dan kelas yang menyatakan kepentingan secara kadangkala melalui individu-individu, kepala keluarga atau pemimpin agama, dan semacam itu. Secara teoritis, kegiatan kelompok kepentingan ini merupakan ciri masyarakat belum maju, di mana kesetiaan kesukuan atau keluarga-keluarga aristokrat mendominasi kehidupan politik dan cukup terorganisir.

3. Kelompok Institusional

Kelompok kepentingan ini bersifat formal dan memiliki fungsi-fungsi politik atau sosial lain disamping artikulasi kepentingan. Organisasi seperti partai politik, korporasi bisnis, badan legislatif, militer, birokrasi, dan gereja seringkali mendukung kelompok kepentingan institusional. Bila kelompok-kelompok kepentingan institusional sangat berpengaruh, biasanya akibat dari basis organisasinya yang kuat.

4. Kelompok Asosiasional

Kelompok ini meliputi serikat buruh, kamar dagang atau perkumpulan usahawan dan industrialis, paguyuban, persatuan-persatuan yang diorganisir oleh kelompok-kelompok agama dan lain sebagainya. Secara khas kelompok ini menyatakan kepentingan dari suatu kelompok khusus, memakai prosedur teratur untuk merumuskan kepentingan dan

tuntutan. Kelompok ini bila diijinkan untuk berkembang, cenderung dapat menentukan perkembangan dari jenis kelompok kepentingan yang lain.

Kelompok kepentingan dengan sumber daya manusia yang berkualitas jelas akan lebih menguatkan posisi kelompok kepentingan

tersebut dalam sistem politik yang ada. Dalam memperjuangkan kepentingannya langkah yang ditempuh antara lain: (Ramlan Surbakti, 1992).

PEMBAHASAN

1. Artikulasi Kepentingan Pemikiran Hijau LSM Nol Sampah Surabaya dalam Kasus Pengelolaan Ekowisata Mangrove Wonorejo

Dalam pendampingan yang dilakukan oleh LSM Nol Sampah kepada Petani lokal pohon mangrove di wonorejo, kepentingan yang coba ditanamkan adalah dengan menegembalikan pengelolaan Ekowisata dengan benar. Benar disini adalah pengelolaan yang memang sesuai dan baik untuk keberlangsungan ekosistem dan biota yang terdapat di hutan mangrove wonorejo.

Bagaimanapun pengelolaan yang benar terhadap ekosistem mangrove adalah untuk kepentingan manusia. Kerusakan dan kepunahan ekosistem mangrove akan berdampak pada ekosistem lainnya, dan dampak terbesarnya adalah pada kehidupan manusia, baik social, ekonomi maupun politik.

Ekosistem mangrove juga merupakan pelindung pantai dari abrasi yang diakibatkan oleh gelombang pasang maupun tsunami. Dissamping itu ekosistem mangrove merupakan salah satu tempat rekreasi dan pengembangan ilmu dan teknologi. Ekosistem mangrove juga merupakan penyangga kehidupan di darat, karena berbagai hewan darat, termasuk burung hidup dan mencari makan di ekosistem ini. Bahkan menjadi tempat mencari makan dan bersistirahat bagi burung-burung migrant antar benua.

Dengan pengelolaan yang kurang benar dapat menyebabkan ketidak seimbangan ekosistem, burung tang tadinya selalu bertempat di area hutan mangrove, saat ini menjadi semakin sedikit. Hal itu kemungkinan disebabkan oleh semakin ramainya kawasan Ekowisata mangrove Wonorejo tersebut.

Ekosistem mangrove selain mempunyai fungsi ekologis yang telah dijelaskan diatas, juga mempunyai potensi dan manfaat ekonomi yang sangat besar. Ekosistem mangrove member kontribusi secara nyata bagi peningkatan pendapatan masyarakat, devisa

untuk daerah, dan Negara. Produk yang diperoleh dari ekosistem mangrove berupa kayu bakar, bahan bangunan, pupuk, bahan baku kertas, bahan makanan, obat-obatan, minuman dan

lainnya. Saenger et al. (1983) mengidentifikasi lebih dari 70 macam kegunaan hutan mangrove bagi kepentingan manusia, baik produksi langsung maupun tidak langsung.

Ekosistem hutan mangrove memberikan banyak manfaat baik secara tidak langsung (non economic value) maupun secara langsung kepada kehidupan manusia (economic values). Manfaat tidak langsung sebagai konsumsi manusia antara lain adalah:

Menumbuhkan pulau dan menstabilkan pantai, salah satu peran dan sekaligus manfaat ekosistem mangrove, adalah adanya sistem perakaran mangrove yang kompleks dan rapat, lebat dapat memerangkap sisa-sisa bahan organik dan endapan yang terbawa air laut dari bagian daratan.

- a) Menjernihkan air, akar pernafasan (akar pasak) dari api-api dan tancang bukan hanya berfungsi untuk pernafasan tanaman saja, tetapi berperan juga dalam menangkap endapan dan bisa membersihkan kandungan zat-zat kimia dari air yang datang dari daratan dan mengalir ke laut.
- b) Mengawali rantai makanan, daun mangrove yang jatuh dan masuk ke dalam air.

Setelah mencapai dasar teruraikan oleh mikro organisme (bakteri dan jamur).

- c) Melindungi dan memberi nutrisi, Akar tongkat pohon mangrove memberi zat makanan dan menjadi daerah nursery bagi hewan ikan dan invertebrata yang hidup di sekitarnya.

2. Upaya LSM Nol Sampah Mendampingi Petani Lokal Pohon Mangrove Wonorejo Non Mitra Pemerintah

Dalam melakukan pendampingan kepada petani lokal, LSM Nol sampah melakukan berbagai cara, antara lain:

a. Sosialisasi

Pada awal pendampingan yang dilakukan LSM Nol sampah kurang lebih diawal tahun 2005, upaya pertama adalah dengan melakukan sosialisasi kepada petani lokal yang tidak

terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan Ekowisata Mangrove Wonorejo. Sosialisasi tersebut ditujukan untuk menanamkan pondasi awal kerjasama antara LSM Nol Sampah dengan petani mangrove. Persamaan persepsi dan pengetahuan tentang pentingnya pengelolaan hutan mangrove yang benar adalah tujuan lebih jauh yang coba ditanamkan kepada petani lokal. Dengan adanya persamaan persepsi tersebut, diharapkan petani lokal mampu menjadi "pengawas" di daerahnya sendiri seandainya terjadi kesalahan pengelolaan ekowisata mangrove Wonorejo kedepannya.

b. Pelatihan

Pelatihan ini ditujukan tentunya untuk memberikan pengetahuan teknis kepada petani lokal. Jenis bakau apa saja yang cocok ditanam di sekitar wonorejo, bagaimana pemanfaatannya, bagaimana teknik penanamannya, teknik perawatannya, teknik pembibitannya, dan lain sebagainya.

Upaya ini dilakukan oleh LSM Nol sampah kepada petani lokal pada awalnya, namun dalam perjalanannya semakin banyak pihak yang semakin sadar dan tertarik untuk mengikuti kegiatan ini, Mulai dari akademisi, masyarakat sekitar, mahasiswa, hingga jurnalis. hal tersebut membuat baik LSM Nol Sampah maupun petani lokal menjadi semakin bersemangat.

c. Pengawasan

Setelah kedua kegiatan teknis berhasil dilaksanakan bersama, selanjutnya adalah proses pengawasan. Pengawasan yang dilakukan adalah dengan melalui berbagai cara mulai dari upaya diskusi, provokasi media, hingga laporan langsung kepada PEMKOT Surabaya apabila terjadi kesalahan atau penyelewengan pengelolaan ekowisata.

Pengawasan tersebut tak henti-hentinya dilakukan oleh LSM Nol Sampah, Petani Lokal, bersama LSM lain dan masyarakat pecinta lingkungan. Mengingat dalam perjalanan pengelolaannya memang banyak sekali kesalahan yang terjadi entah yang berkaitan dengan teknis, hingga hokum ekologi.

3. Proses Politik Yang Terjadi Dalam Gerakan Pendampingan LSM Nol Sampah Terhadap Petani Lokal Pohon Mangrove Wonorejo Non Mitra Pemerintah Proses Pengawasan Ekowisata

Penurunan kawasan hutan mangrove di pantai timur Surabaya (Pamurbaya) diprediksi akan terus berlangsung. Pemkot mengandalkan Badan Perencana Pembangunan Kota (Bappeko), Dinas Pertanian (Distan) Kota dan para lurah serta camat untuk melakukan pencegah pembalakan hutan mangrove Pamurbaya, namun tidak disertai program yang tepat dalam upaya untuk pencegahan pembalakan di tahun-tahun yang akan datang.

Pembalakan mangrove semakin menjadi luas akibat kebutuhan akan lahan untuk pengembangan perumahan semakin bertambah dan di khawatirkan akan merambah pada wilayah pesisir. Mangrove semakin lama semakin bekurang akibat konversi lahan menjadi area pertambakan.

Tadinya masalah tersebut coba diatasi dengan dioperasikanya Ekowisata Mangrove Wonorejo, namun dalam perjalanannya Ekowisata mangrove di muara Wonorejo Kecamatan Rungkut ini disoal aktivis lingkungan di antaranya Komunitas Nol Sampah, Ecoton, Rumah

Mangrove Surabaya, dan kelompok pengamat burung Peksia Unair. Mereka menilai kegiatan ekowisata di Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) tersebut justru merusak ekosistem mangrove di kawasan Pamurbaya.

Media Campaign dan Tuntutan Pengelolaan ekowisata oleh LSM Nol Sampah dan Petani Lokal

Sebagai LSM yang sadar akan pentingnya publikasi dari setiap kegiatannya, LSM Nol Sampah juga tidak lupa selalu melepar isu bahwa pengelolaan ekowisata mangrove yang ada di Wonorejo menyalahi aturan. Sebagai mantan wartawan Hermawan Some yang merupakan ketua LSM Nol Sampah tentu memiliki jaringan yang cukup kuat untuk diajak bekerja sama mengangkat masalah pengelolaan ekowisata tersebut.

Seperti yang dimuat di Antara pada 9 Juni 2012, Hermawan some yang diwawancarai wartawan Antara mengatakan ekowisata mangrove seharusnya tidak melakukan eksploitasi alam, namun sebatas menggunakan jasa alam dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan, fisik, dan psikologis wisatawan. Namun dalam perkembangannya, muncul

permasalahan baru salah satunya dengan digelarnya pagelaran musik dangdut di kawasan tersebut.

Tanggapan dari FKPM Terhadap Tuntutan Pengelolaan ekowisata oleh LSM Nol Sampah dan Petani Lokal

Menanggapi pelemparan isu dan provokasi yang juga dilakukan di berbagai media massa, pengelola mengatakan bahwa pengelola Ekowisata telah mencoba dengan sepuh kemampuan. Tidak ada maksud lain selain mengembangkan ekowisata tersebut untuk kebaikan bersama. Dari berbagai tuntutan yang diutarakan oleh LSM Nol sampah dan petani lokal diberbagai kesempatan, ada juga yang tidak bias dikabulkan oleh pengelola dalam hal ini FKPM, salah satunya adalah peniadaan arena jogging track yang menurut LSM Nol Sampah hal tersebutlah yang semakin merusak ekosistem yang ada.

4. Pengelolaan Ekowisata Wonorejo Oleh FKPM Nirwana Eksekutif

EKOWISATA mangrove Wonorejo Rungkut diprakarsai oleh camat rungkut, lurah wonorejo berserta FKPM Nirwana eksekutif serta di sahkan dengan Keputusan Lurah Wonorejo nomor : 556/157/436.11.15.5/2009 tanggal 1 Juli 2009, dan dikukuhkan oleh walikota surabaya Drs. bambang DH pada tgl 9 Agustus 2009 bersamaan dengan peresmian gazebo mangrove, serta pengelolaan diserahkan ke masyarakat wonorejo dan sekitarnya. Program wisata ini bertujuan sebagai upaya pengendalian penembangan mangrove secara liar.

Adapun indikator ketercapaian program pengembangan mangrove terpadu antara lain Terbangunnya area wisata, Peningkatan kesadaran masyarakat akan fungsi dan manfaat mangrove, Peningkatan pendapat masyarakat setempat, Peningkatan kondisi lingkungan kawasan pesisir, Jumlah sarana dan prasarana penunjang, Peningkatan keberdayaan masyarakat sekitar.

KESIMPULAN

Menurut LSM Nol Sampah dan petani lokal, banyak terdapat kesalahan dalam

pengelolaan Ekowisata di Wonorejo. Perlu adanya perhatian khusus dari PEMKOT untuk mengatasi hal ini mengingat FKPM dinilai kurang mampu mengelola ekowisata dengan baik.

Tadinya masalah tersebut coba diatasi dengan dioperasikanya Ekowisata Mangrove Wonorejo, namun dalam perjalananya Ekowisata mangrove di muara Wonorejo Kecamatan Rungkut ini disoal aktivis lingkungan di antaranya Komunitas Nol Sampah, Ecoton, Rumah Mangrove Surabaya, dan kelompok pengamat burung Peksia Unair. Mereka menilai kegiatan ekowisata di Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) tersebut justru merusak ekosistem mangrove di kawasan Pamurbaya.

Namun dengan banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan Ekowisata tersebut, terjadi saling lempar isu. Bila dari LSM Nol Sampah dengan petani binaanya, beserta LSM pemerhati lingkungan lain mengatakan terjadi kesalahan dan perlu adanya perbaikan pengelolaan yang sesuai dengan hokum ekologis, bahkan meminta PEMKOT Surabaya untuk mengambil alih pengelolaan dari FKPM Nirwana Eksekutif.

Disisi lain, pihak FKPM Nirwana Eksekutif sebagai pengelola resmi membantah berbagai tuduhan dan isu yang dilemparkan oleh berbagai LSM di banyak media massa dan media lain, menurut mereka pengelolaan yang ditempuh selama ini sudah dipertimbangkan dengan baik, meski mereka juga mengakui adanya kekurangan yang nantinya akan bersama-sama diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Mirriam, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Chadwik, A. Bruce; Bahr, Howard M.; Albrecht Stan L, 1991, *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*, IKIP Semarang Press, Semarang.
- Dobson, Andrew, 2007, *Green Political thought 4th edition*, Routledge, New York.

Gaus, F. Gerald, dan Chandran Kukathas, 2012, *Handbook Teori Politik*, Nusamedia, Jakarta

Koentjaraningrat, 1994, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Linklater, Andrew dan Burchill, Scott. (1996) *Theories of International Relations*. New York: ST Martin's Press, inc.

Moleong, Lexy J., 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Muhadjir, Noeng, 1993, *Metode Penelitian Kualitatif: telaah Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik dan Realisme Metaphisik*, Rake Sarasin, Yogyakarta.

Surbakti, A. Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta,

Suyanto, Bagong dan Sutinah, 2005, *Metode Penelitian Sosial; Berbagai Alternatif Pendekatan*, Pranada Media, Jakarta.

Varma, S.P, 2001, *Teori Politik Modern*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

, 1993, *The politics of nature : Explorations in green political theory*, Routledge, New York.

.

Jurnal

Status Lingkungan Hidup Kota Surabaya tahun 2007

Status Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2010

Media Cetak dan Internet

Detik Surabaya, Senin 26/03/2012

Surabaya pagi.com, 06/05/2011

Surabaya Pos Online, Minggu, 05/06/2011